

BIG VERIFIKASI PROYEK STRATEGIS NASIONAL PENDUKUNG KEK TANJUNGLESUNG



FGD Kawasan Ekonomi Khusus Tanjunglesung

Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2017 sebagai pengganti PP 3 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu didukung oleh semua pihak. Salah satunya adalah dukungan BIG terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjunglesung yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). BIG berperan untuk membantu mempersiapkan dan menyiapkan data dasar untuk mendukung setiap kegiatan strategis.

Maksud kegiatan ini untuk melihat seberapa besar pengaruh dari kebijakan pembangunan KEK terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui analisis perubahan pemanfaatan lahan. Kajian dinamika sosial

yang dilakukan saat ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan lahan akan berdampak terhadap perkembangan wilayah.

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Dinamika Sumberdaya KEK Tanjunglesung. FGD bertujuan untuk menelaah aspek geospasial terkait kebijakan pembangunan sebagai bagian dari melakukan verifikasi proyek strategis nasional dan rencana pengembangan infrastruktur pendukung KEK Tanjunglesung. FGD ini mengundang stakeholder terkait antara lain Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang serta Pengelola KEK Tanjunglesung.

Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Dr. Mulyanto Darmawan, M.Sc. mengharapkan ada klarifikasi dari pemerintah daerah terkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional termasuk proses revisi RTRW Provinsi Banten dan RTRW Kabupaten Pandeglang. Kajian dinamika sumberdaya yang dilakukan saat ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan lahan akan berdampak terhadap perkembangan wilayah.

Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Kurnia Satriawan menggambarkan proyek strategis nasional pendukung KEK Tanjunglesung. Beliau mengungkapkan bahwa Bandara Banten Selatan berdasarkan

PP 58 Tahun 2017 dihilangkan dari proyek strategis nasional namun tetap dimasukkan dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten. Andi Kusuma dari Bappeda Provinsi Banten menyampaikan beberapa proyek strategis yang sudah diakomodir dalam revisi RTRW Provinsi. Beberapa program percepatan KEK Tanjunglesung sudah dimasukkan dalam indikasi program.

Darinto Suminto dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang menjelaskan progress pengerjaan tol Serang-Panimbang termasuk lokasi exit tol yang akan digunakan sebagai driving factor model. Beberapa ruas jalan akan dinaikkan kelasnya untuk mendukung percepatan KEK Tanjunglesung. Paparan Joyce Irmayanti dari Administrator KEK Tanjunglesung memberikan masukan skenario yang akan digunakan dalam model.

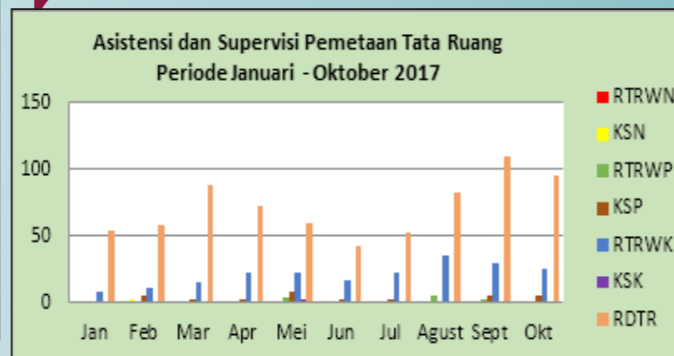
FGD ditutup oleh Kepala Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, Habib Subagio. Ada beberapa hasil kesepakatan mengenai skenario model dan driving factor model. Kegiatan ini sejalan dengan harapan Bappenas bahwa model bukan hanya sebagai Decision Support System (DSS) untuk mendukung pengambilan keputusan namun menjadi Decision System (DS) yang mampu memberikan dampak setiap kegiatan sehingga keputusan yang diambil memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. [Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2017]

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG

Data Asistensi dan Supervisi Peta Tata Ruang Periode Januari - Oktober 2017

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Jumlah
RTRWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KSN	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	6
RTRWP	1	1	1	2	4	2	1	6	3	0	21
KSP	2	6	3	3	8	3	3	2	5	5	40
RTRWK	8	11	16	22	22	17	23	36	30	26	211
KSK	0	0	0	1	3	0	0	2	0	2	8
RDTR	54	58	88	72	60	42	53	83	109	96	715
Total	65	79	108	100	99	65	80	129	147	129	1001

Kompilator Data: Marhensa Aditya Hadi, 2017



Sidang Pleno Penyusunan Peta RTRW Provinsi Riau



Sidang Pleno Penyusunan Peta RDTR Kec. Toroh, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah



Sidang Pleno Perubahan Peta RTRW Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Penyerahan Surat Rekomendasi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Pemerintah Daerah



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pttra_big



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA DAN ATLAS

CATATAN BERANDA

Setiap tahun, di bulan Oktober boleh dibilang bulan spesial BIG. Selain memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bulan ini juga sebagai Hari Informasi Geospasial (HIG) ke 48 tepatnya 17 Oktober yang cukup meriah diperingati dan dimaknai. Karenanya tepat bila semangat sumpah pemuda disandingkan dengan tema HIG tahun ini yaitu "Kemandirian Geospasial untuk Kedaulatan Bangsa" dan untuk itu diadakan acara pemberian penghargaan atas berbagai prestasi, produk dan inovasi teknologi bidang geospasial.

Diantara pemberian penghargaan adalah rekomendasi atas peta tata ruang wilayah yang dianggap sudah baik dan benar. Ada 7 wilayah yang mendapat rekomendasi pada peringatan HIG tersebut yaitu Provinsi Riau untuk RTRW provinsi, Kota Mataram dan Kota Padang untuk RTRW kota. Untuk RDTR diberikan kepada Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Alor.

Peta tata ruang wajib divalidasi oleh BIG sesuai dengan PP 8 Tahun 2013 tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Peta tata ruang 7 wilayah tersebut telah melalui asistensi dan bimbingan teknis pada aspek geometris ketelitian peta, aspek tematik peta rencana, aspek kartografis dan konsistensi antara peta rencana dan dokumen rancangan peraturan daerah (RaPerda).

Tema HIG sangat tepat untuk disosialisasikan. Pencanaan kemandirian geospasial berarti BIG harus memberi contoh kepada instansi pemerintah pusat dan daerah bagaimana infrastruktur geospasial nasional mesti direncanakan, dimanfaatkan dan dijadikan bahan pengendalian jalannya pembangunan. Untuk itu, Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) mesti dilengkapi dengan baik dan benar agar akurat, update dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas berat menuju kemandirian geospasial tersebut tentu tidak hanya dipikul oleh satu kedeputusan di BIG ataupun satu instansi pemerintah pusat tetapi merupakan tugas semua pihak. Kita boleh tidak sama tetapi

kita wajib kerjasama. Mengerucut ke Pusat Pemetaan Tata ruang dan Atlas, kemandirian geospasial ditempuh melalui iterasi kegiatan dalam percepatan penyelesaian peta tata ruang melalui asistensi dan bimbingan intensif, optimalisasi kajian spasial dinamis dari dampak pengembangan wilayah terhadap sektor ekonomi, sosial dan lingkungan sekitar, serta pembangunan e-atlas dan pemetaan sosial.

Berbagai upaya dilaksanakan, termasuk penyiapan kebersihan dan kerapian ruang yang akhirnya berbuah penghargaan dari panitia HIG bahwa gedung F lantai 2 terpilih sebagai gedung terbersih. Luar biasa, ditengah usaha peningkatan aktivitas kegiatan akhir tahun, tim kreatif PPTRA masih menyempatkan diri menata ruangan sehingga bersih dan rapi. Selamat PPTRA dan terus berkarya, selamat membaca [Mulyanto Darmawan, 2017]

ISU STRATEGIS & INFO KEBIJAKAN

Rapat pimpinan BIG bulan Oktober lalu, membahas dan menyortir soal program 2018. Khususnya PPTRA terkait percepatan tata ruang, kajian spasial dinamis dan pemetaan atlas aktual. Hasil pertemuan trilateral antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan BIG beberapa waktu sebelumnya memang telah menyepakati adanya tambahan dana dari pusat teknis lain untuk mendukung percepatan pemetaan tata ruang. Rincian tambahan dana tersebut tersebar pada dua program utama PPTRA yaitu sekitar 6,5 milyar untuk mendukung percepatan peta tata ruang pada 150 BWP (bagian wilayah perencanaan) dan sekitar 3 milyar untuk kajian spasial dinamis terkait pengembangan model spasial dinamis untuk mengetahui dinamika spasial sumberdaya kawasan, ekonomi, sosial dengan laju konversi lahan pada Kawasan Bandar Kayangan sebagai Global Hub Bandar di Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Rapat menyepakati pentingnya informasi hasil kajian spasial dinamis bagi pengambil kebijakan dalam menentukan skenario pengembangan wilayah. Demikian pula pemahaman atas program percepatan tata ruang yang terbagi menjadi beberapa kegiatan berupa bantuan dan bimbingan teknis penyelesaian RDTR pada 100 BWP dan penyelesaian RTRW pada 50 BWP, serta dukungan asistensi dan supervisi peta tata ruang melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa. Percepatan peta tata ruang mutlak diperlukan agar persoalan mengenai isu penyusunan tata ruang tidak terhambat karena persoalan peta. Sementara hasil review kami dan berdasar pengalaman dalam asistensi, persoalan lambatnya penyusunan tata ruang lebih pada beberapa isu seperti kawasan kehutanan

dan kajian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk PPTRA adalah bagaimana menata ulang kegiatan atlas aktual yang tidak hanya uji keterbacaan tetapi menuju atlas aktual digital dan menjadikan atlas aktual nasional menjadi bahan ajar di sekolah luar biasa (SLB). Banyak masukan yang saat ini sedang dibahas internal. Saat ini PPTRA sedang mencari rekan kerja dan narasumber terkait atlas aktual digital. Tentu bukan pekerjaan mudah tetapi juga bukan hal yang mustahil bila kita dapat menyiapkan atlas aktual digital dan lebih interaktif misalnya ada volume suara sehingga para penyandang disabilitas dapat menikmati hak informasi geospasial yang memang diatur dalam undang-undang. [Mulyanto Darmawan, 2017]

Percepatan Pemetaan Tata Ruang

- Bimbingan teknis penyusunan Peta RTR (pada daerah prioritas SDM pemetaannya terbatas).
- Supervisi ke daerah (pada daerah prioritas namun terkendala untuk datang ke BIG).
- Bantuan Uji akurasi (Pada daerah prioritas yang memiliki kendala penyediaan IGD).
- Penyusunan basisdata asistensi dan supervisi Peta RTR.

Rekomendasi

- Penjadwalan rapat pleno penerbitan rekomendasi Peta RTR
- Pelaksanaan rapat pleno penerbitan rekomendasi di BIG atau di daerah.

Pemantauan dan Evaluasi

- Penjadwalan asistensi (waktu, tempat, dan SDM)
- Tim dukungan asistensi Peta RTR.
- Pelibatan PPIDS atau personil K/L dalam verifikasi Peta RTR.
- Bantuan teknis pemetaan tata ruang (daerah prioritas).

Pre-eliminatory Analysis

- Review status penyusunan Peta RTR.
- Pemilihan area untuk didorong melalui surat (bagi yang hampir selesai atau yang sudah ada IGDnya).
- Pengecekan ketersediaan IGD.

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Fakhrudin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Ellen Suryanegara, Marhensa Aditya Hadi, Chintia Dewi, Rakyana Paksi, Rochmad Budi S., I Made Dipta S. | Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

PPTRA KEMBANGKAN KEMBALI APLIKASI E-ATLAS NASIONAL INDONESIA

E-Atlas Nasional Indonesia merupakan salah satu model atlas berbasis web yang dikembangkan oleh BIG melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA). Aplikasi ini menyajikan informasi geospasial tematik dan dapat diakses oleh publik secara luas. Aplikasi berbasis web ini telah dapat diakses melalui browser dari komputer desktop dan perangkat mobile karena terpublikasikan pada akhir tahun 2016. Pada tahun 2017, PPTRA melakukan pengembangan dan penambahan tema atlas serta penyempurnaan melalui aspek desain, performa, fitur, dan konten. Kegiatan pengembangan aplikasi ini melibatkan tim teknis dan narasumber dari akademisi yang ahli dibidang web-GIS, maupun bidang-bidang pendukung yang lain. Dalam rangka pengembangan tersebut dilakukan pertemuan teknis dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) di Hotel Royal Bogor pada tanggal 2 Oktober 2017, dipandu oleh Kepala Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial, Dra. Niendyawati, M.Sc.



FGD Pengembangan Aplikasi e-Atlas

Pelaksanaan FGD dihadiri oleh Deputi Bidang IGT, Dr. Ir. Nurwadjadi, M.Sc yang memberikan arahan mengenai konten tematik dikaitkan dengan wilayah NKRI. Hadir pula Kepala Pusat PTR, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc yang menekankan pentingnya aspek tata ruang dan kawasan konservasi agar diketahui masyarakat lewat tampilan atlas. Tak kalah menarik masukan dari para narasumber yang hadir yaitu Dr. Trias Aditya Kurniawan dari Jurusan Teknis Geodesi UGM, Dr. Taufik Hery Purwanto dari Fakultas Geografi UGM, dan Dr. Hasan Djafar, ahli arkeologi dari UI. Narasumber berharap model ini dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh publik melalui tampilan dan menu yang mudah.

FGD menghasilkan rencana konkret untuk mengembangkan aplikasi dari sisi sistem dan konten. Hasil dari FGD ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi e-Atlas Nasional Indonesia agar dapat menjadi lebih menarik, mudah diakses, dan lebih informatif. [Satrio Jati, 2017]

POTRET KEGIATAN

JAWA BARAT, PILOT PROJECT PROGRAM PERCEPATAN ASISTENSI DAN SUPERVISI PETA RENCANA TATA RUANG

Dalam rangka proses percepatan peta rencana umum tata ruang dan rencana detil tata ruang, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG, melakukan proses 'jemput bola'. Jawa Barat menjadi wilayah *pilot project* aktivitas ini. Klinik asistensi dan supervisi dilakukan secara intensif terhadap peserta yang berasal dari satuan kerja terkait tata ruang di kabupaten/kota wilayah Jawa Barat. Kegiatan dilakukan pada tanggal 18-20 Oktober 2017. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan status capaian proses asistensi pada masing-masing peta yang sedang dikerjakan baik RTRW Kabupaten/Kota maupun RDTR.

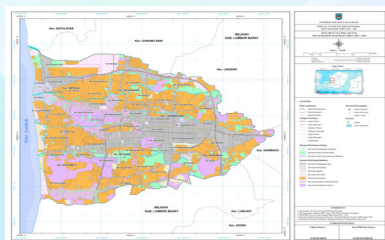
Tim Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta PPIIDS ITB mengundang 27 Kabupaten/Kota untuk melakukan klinik asistensi dan supervisi peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota serta Rencana Detail Tata Ruang. Kegiatan ini disambut dengan sangat antusias oleh pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari banyaknya peserta yang hadir dan antusias mengikuti acara sampai tuntas. Untuk beberapa wilayah yang sudah memiliki sumber data diharapkan segera menyelesaikan peta tata ruang hingga album peta dan mendapatkan rekomendasi di tahun yang sama.

Tindak lanjut dari acara ini akan dipantau oleh BIG dengan membuat data statistik kemajuan peta. Data tersebut akan menjadi acuan dan pemacu dalam proses mempercepat penyelesaian peta tata ruang terutama bagi daerah-daerah yang berkomitmen akan segera menyelesaikan secara cepat. Tim BIG juga mengingatkan bahwa ke depan perlu menjalankan inovasi-inovasi percepatan yang sudah dibuat seperti asistensi *online* dan memanfaatkan acara program intensif sehingga rekomendasi dapat segera diperoleh. [Chintia Dewi, 2017]



Kegiatan Percepatan Program Asistensi Peta Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Barat

DUA BULAN SELESAIKAN PETA PERUBAHAN RTRW KOTA MATARAM



Peta Rencana Pola Ruang Kota Mataram

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa. Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok. Wilayah kota meliputi ruang darat seluas 6.130 hektar dengan batas administrasi sebelah utara, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok. Kota Mataram terbagi dalam 6 kecamatan dan 50 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 459.314 jiwa (<https://mataramkota.bps.go.id>). Terkait dengan tata ruang, Kota Mataram mempunyai prestasi tersendiri.

Rapat pleno dalam rangka persetujuan Peta Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram tahun 2011-2031 dilakukan dalam rangka memperoleh Surat Rekomendasi yang merupakan salah satu syarat disahkannya perda oleh Kementerian ATR/BPN berdasarkan amanat PP Nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Acara tersebut dihadiri oleh Wartan, SH, MH selaku Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mataram dan Tim Teknis Bappeda Kota Mataram. Dalam rapat pleno, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc selaku Kepala Pusat PTR menyampaikan apresiasi terhadap proses pembuatan peta yang merupakan tercepat di BIG. Asistensi dan supervisi berlangsung selama 2 bulan pertemuan pertama pada tanggal 23 Agustus 2017 dan akhirnya mencapai pleno rekomendasi pada tanggal 23 Oktober 2017.

Target penyelesaian peta selama dua bulan merupakan komitmen bersama antara Tim Teknis dari Bappeda Kota Mataram dan Tim Teknis Asistensi dan Supervisi dari

PPTRA BIG. Kepala Bidang Perencanaan SDA, SARPRAS dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Mataram, L. Bramantio Ganeru menyampaikan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat membuat penyelesaian peta dasar dan peta tematik berlangsung cepat. Faktor percepatan penyelesaian peta dasar adalah tersedianya citra tegak resolusi tinggi di BIG dan ketersediaan data Pemerintah Kota Mataram yang telah dipersiapkan sejak tahun 2015 sebagai bahan Perubahan Peta RTRW Kota Mataram. Kondisi ini didukung oleh faktor percepatan penyelesaian peta tematik berupa selesainya survei pada tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Kawasan Permukiman di Kota Mataram.

Hasil rapat pleno mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa catatan yang menyatakan bahwa Peta Perubahan RTRW Kota Mataram sudah sesuai dengan kaidah pemetaan skala 1:25.000 meliputi aspek sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana, dan album peta. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Pemerintah Kota Mataram dalam acara Hari Informasi Geospasial pada tanggal 24 Oktober 2017. [Diastarini, 2017]

Tim Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta PPIIDS ITB mengundang 27 Kabupaten/Kota untuk melakukan klinik asistensi dan supervisi peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota serta Rencana Detail Tata Ruang. Kegiatan ini disambut dengan sangat antusias oleh pemerintah daerah. Hal ini terbukti dari banyaknya peserta yang hadir dan antusias mengikuti acara sampai tuntas. Untuk beberapa wilayah yang sudah memiliki sumber data diharapkan segera menyelesaikan peta tata ruang hingga album peta dan mendapatkan rekomendasi di tahun yang sama.

SEBATIK, PULAU TERLUAR YANG TERUS BERBENAH



Rumah yang kamar tamunya di Wilayah Indonesia tetapi dapur di Wilayah Malaysia

Pulau Sebatik merupakan pulau yang dimiliki oleh dua negara. Indonesia di bagian selatan dan Malaysia di bagian utara. Wilayah Indonesia di Pulau Sebatik terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Utara, Sebatik Timur, dan Sebatik. Kelima kecamatan tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pada minggu ke-3 bulan September 2017, Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial melakukan survei dan validasi data sosial ekonomi di

pulau tersebut untuk Pembuatan Dataset Atlas dan Pemetaan Sosial Kewilayahan. Pembuatan dataset ini untuk memastikan tersedianya data geospasial dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Dataset tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengambil kebijakan menangani masalah sosial di wilayah perbatasan.

Perhatian intensif dari pemerintah pusat untuk halaman terdepan Indonesia mulai dirasakan warga Pulau Sebatik sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, warga cenderung membeli kebutuhan bahan pokok di Malaysia karena harganya jauh lebih murah dibandingkan barang pokok dari negara sendiri sehingga ada istilah "Garuda di dadaku, Malaysia di perutku". Saat ini, kebutuhan bahan pokok dapat terpenuhi dari negara sendiri dengan biaya yang terjangkau. Hal ini tidak terlepas dari biaya pengiriman barang kebutuhan pokok dari Pulau Jawa ke Sebatik disubsidi oleh pemerintah. Tidak hanya bahan pokok, tetapi juga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dahulu harganya tinggi, kini harganya sama dengan wilayah lain di Indonesia. Proses pengiriman logistik

tersebut juga didukung dengan pembangunan tol laut di Pulau Sebatik. Beberapa catatan hasil survei sosial ekonomi diperoleh oleh tim BIG. Pendidikan di Sebatik tergolong sudah cukup maju. Di pulau ini terdapat 21 SD, 8 SMP, 3 SMP, dan 3 SMK dengan kondisi bangunan sekolah permanen dan semi permanen untuk beberapa sekolah. Jumlah guru di Sebatik tercukupi karena Pemkab Nunukan menerapkan regulasi terhadap guru yang meminta mutasi ke tempat lain harus menyiapkan guru pengganti agar tidak terdapat kekosongan tenaga pengajar.

Pengamatan intensif juga dilakukan terhadap berbagai infrastruktur pulau terluar ini. Infrastruktur jalan di Pulau Sebatik sudah memadai. Semua jalan sudah terhubung meskipun keadaan/kondisi jalan yang berbeda (aspal, beton, batu). Beberapa titik jalan terjadi kerusakan disebabkan oleh longsor. Pelabuhan Baru di Sebatik Utara memiliki dermaga yang dapat digunakan untuk bersandar kapal-kapal besar. Dermaga untuk bersandar *speedboat* juga terdapat di Bambang, Sebatik Barat. Sarana kesehatan seperti puskesmas sudah memadai untuk melayani masyarakat Pulau Sebatik. [Erna Kusumawati, 2017]

KONTROL KUALITAS KARTOGRAFI



Koreksi Secara Kartografi

Kartografi merupakan ilmu dan seni dalam pembuatan desain dan produksi peta. Informasi yang ada di permukaan bumi disajikan secara visual dalam bentuk peta dengan mengikuti kaidah yang telah ditentukan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kartografi terus berkembang menyebabkan peta bukan hanya disajikan dalam selebar kertas (*realmaps*) namun dapat disimpan dalam bentuk digital. Meskipun demikian keberadaan peta cetak tetap dibutuhkan dalam berbagai keperluan.

Koreksi secara kartografi dilakukan sebagai kontrol kualitas peta yang dihasilkan. Peta yang baik akan mampu memberikan gambaran permukaan bumi secara efektif, informatif dan komunikatif kepada pengguna. Oleh karena itu, desain peta memegang peran penting dalam penyajian peta. Tata letak suatu peta yang meliputi muka peta dan informasi tepi perlu mengikuti kaidah kartografi dengan mempertimbangkan aspek estetika.

Komposisi peta baik dalam pemilihan jenis dan ukuran huruf, simbol dan pewarnaan juga perlu diperhatikan.

Berbeda dengan peta dasar yang sudah memiliki standar dan ukuran baku, peta tematik memiliki karakteristik tersendiri dimana banyak tema dan ukuran yang berbeda. Kontrol kualitas kartografi oleh tim kartografi di Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya dilakukan secara sistematis dan periodik. Penyajian muka peta dilihat komposisi penyajiannya. Penulisan toponimi juga dilihat tata letak dan penulisannya. Jenis huruf, ukuran, dan warna huruf serta penulisannya dikoreksi satu per satu. Sebagai contoh, penulisan tema perairan ditulis berwarna biru *italic* (cetak miring) dengan ukuran dan jenis huruf menyesuaikan peta. Penyajian tema perhubungan dilihat pewarnaan dan tebal garis jalan dengan melihat kelas dan tipe jalan.

Koreksi pada informasi tepi juga dilakukan mengikuti kaidah kartografi. Penulisan judul peta harus jelas dan dilengkapi dengan orientasi, skala, sistem proyeksi, legenda, diagram lokasi, sumber dan riwayat peta. Informasi tersebut dicantumkan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrol kualitas kartografi sebagai bentuk tanggung jawab moral tim kartografi untuk menghasilkan peta yang benar. [Puji Yuwono dan Jainal Arifin, 2017]

GREENESIA

RESENSI BUKU

“**A**nda dan kita semua adalah Patriot Hijau yang akan melakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan dengan bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat mewujudkan Indonesia Menghijau (*Greening Indonesia = Greenesia*)”. Petikan kalimat dalam pengantar buku ini menunjukkan kepada pembaca mengenai latar belakang pemilihan judul buku, dan sekaligus menjadi sebuah kalimat yang memprovokasi pembaca untuk menjadi bagian dari sebuah gerakan. Gerakan yang dapat berkontribusi menghantarkan Indonesia menjadi “hijau” di tengah ancaman nyata darurat bencana.

Pada bagian awal buku ini, judul tema yang disajikan sarat dengan sebuah visi besar, “Membangun Indonesia Hijau”. Pembahasan lebih memfokuskan pada bagaimana menciptakan lahan terbangun yang hijau dan ramah lingkungan, mulai dari perumahan hijau, perkantoran hijau, hotel hijau, industri hijau, hingga upaya-upaya untuk bebas dari masalah persampahan.

Pada bagian berikutnya, pembahasan lebih mengerucut dengan mengambil tema “Menuju Kota Hijau”. Bagaimana gerakan kota hijau dilaksanakan, aksi menghadapi perubahan iklim, upaya mewujudkan kota layak huni, pengembangan kreativitas kota, pemanfaatan ruang terbuka publik, hingga bagaimana membangun kota yang tanggap dengan bencana.

Kemudian pada bagian akhir buku ini diulas contoh kasus tentang bagaimana mewujudkan Jakarta hijau. Dimulai dari pembahasan momentum 100 hari Jokowi, menyongsong Jakarta baru, audit tata ruang, berbagi tugas mengantisipasi banjir, hingga nasib DKI pasca Jokowi menjadi Presiden RI. [Rochmad Budi Santoso, 2017]

Judul Buku : Greenesia
Penyusun : Nirwono Joga
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014

